

---

SISTEM PENGENDALIAN INTEREN ATAS PIUTANG  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) SEBAGAI  
UPAYA PENINGKATAN KINERJA  
PADA YAYASAN ISLAM AL - HAMIDIYAH DEPOK TANGERANG

Hayuningtyas Pramesti Dewi

FE Universitas Krisnadwipayana Jakarta  
email: ethniz@gmail.com

**Kata kunci:**  
Sistem  
Pengendalian  
Interen, Piutang,  
Peningkatan Kinerja

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas mengenai Sistem Pengendalian Interen pada sebuah organisasi nirlaba pendidikan, yaitu Yayasan Islam Al Hamidiyah Depok. Adapun hal yang disoroti adalah Sistem Pengendalian Interen atas Piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Penelitian ini mengambil data ke Yayasan Islam Al Hamidiyah Depok dan menganalisisnya dengan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen di Yayasan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) yang berlaku, hal ini terlihat dari masih terdapatnya tunggakan dari SPP siswa.*

**Keywords:**  
Internal Control  
System , Receivables

**Abstract**

*This research discusses the internal control system in a non-profit educational organization, namely Al Hamidiyah Islamic Foundation of Depok. The problem that is highlighted is the internal control system on the development of education contribution receivables. This study uses the data of Al Hamidiyah Islamic Foundation of Depok and analyzed with the descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the internal control system in the foundation has not been fully implemented in accordance with the prevailed SOP (Standard Operating Procedures), it can be seen from the presence of arrears of the student's development of education contribution.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan pendidikan bagi rakyatnya. Seluruh anak Indonesia dalam usia sekolah diwajibkan menempuh pendidikan dasar dan menengah. Adapun sekolah di Indonesia terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Persaingan yang begitu sulit untuk bisa masuk ke sekolah negeri membuat sebagian orangtua beralih ke sekolah swasta. Sekolah swasta dapat dibedakan menjadi sekolah swasta nasional, sekolah swasta nasional plus pendalaman agama, dan sekolah swasta bertaraf internasional.

Namun perbedaannya adalah terletak pada penggunaan bahasa yang wajib digunakan selain bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, Arab, atau Mandarin. Sekolah swasta nasional plus pendalaman agama dimaksudkan di sini khususnya agama Islam adalah pesantren. Pesantren salah satu jenis pendidikan yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan pesantren dalam melaksanakan tugas pendidikan tidak diragukan lagi. Terdapat banyak bukti nyata partisipasi pesantren dalam memajukan bangsa. Dengan adanya alumni pesantren yang banyak tampil ditengah-tengah masyarakat sebagai penggerak laju pembangunan. Masyarakat semakin yakin akan pentingnya pesantren.

Adapun pengelolaan organisasi Yayasan yang membawahi pesantren tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya. Diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dalam mengamankan aset yayasan, karena manipulasi dan kecurangan bisa saja terjadi terutama untuk aset – aset yang *likuid*, misalnya kas atau piutang. Masih terdapat kasus kecurangan yang terjadi dalam yayasan pendidikan di Indonesia karena belum terdapat sistem pengendalian internal atau tidak dijalankannya sistem pengendalian internal yang ada. Penelitian ini akan membahas tentang Sistem Pengendalian Internal dalam upaya meningkatkan kinerja pada salah satu yayasan pendidikan yang membawahi pesantren, yaitu Yayasan Islam Al - Hamidiyah Depok Tangerang.

Yayasan memperoleh pendapatan dari siswa berupa dana sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pemasukan-pemasukan lainnya dari siswa sesuai kebijakan sekolah yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan siswa. Pemasukan-pemasukan lainnya seperti, iuran katering, iuran antar jemput, iuran dana pengembangan pembangunan, dana kegiatan siswa (DKS), dana pembelian formulir pendaftaran, dana seragam, iuran persatuan orangtua siswa dan guru (posg), dana buku dan lain-lain.

Penerimaan dana SPP tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang kepada siswa atau disebut piutang SPP, dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas (*cash in flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Kecurangan dalam suatu siklus kerja terjadi sehingga dapat merugikan yayasan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari siswa dan mencurinya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya.

Pengendalian *intern* merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengamankan aset yayasan dan mengantisipasi kecurangan.

### **Permasalahan**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembayaran SPP dalam Yayasan Islam Al – Hamidiyah, apakah Yayasan Islam Al – Hamidiyah telah memiliki sistem pengendalian interen atas SPP, dan jika ada apakah Yayasan telah melaksanakan sistem pengendalian interen atas SPP tersebut. Adapun penulis membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas yaitu penelitian penerapan sistem pengendalian interen ini hanya pada tahun 2012 sampai dengan 2013.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Interen dalam entitas nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu pesantren, adapun Sistem Pengendalian Interen ini akan dijadikan dasar penilaian kinerja entitas tersebut.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Sistem Pengendalian Interen**

Gondodiyoto (2009) mengatakan yang dikutip dari *Committee Sponsoring Organization Tread Way Commission (COSO)*, Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

*COSO* memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2008) pengendalian internal (*internal control*) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

Menurut Hall (2009) pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aset perusahaan.
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 78 (SAS 78), pengendalian internal terdiri atas lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) adalah dasar dari empat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen penting dari lingkungan pengendalian adalah

Integritas dan nilai etika manajemen, struktur organisasi, keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, jika ada, filosofi manajemen dan siklus operasionalnya, prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas, metode manajemen untuk menilai kinerja, pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pemerintah, kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya.

2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. Risiko dapat muncul atau berubah berdasarkan berbagai kondisi, seperti perubahan dalam lingkungan operasional, personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal, Sistem informasi baru atau yang baru direkayasa ulang, pertumbuhan yang cepat dan signifikan, implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi, pengenalan lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi organisasional, memasuki pasar asing yang berdampak pada operasional, adopsi suatu prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan.

3. Informasi dan Komunikasi. Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas berbagai *record* dan metode yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklarifikasi dan mencatat berbagai transaksi perubahan serta untuk menghitung berbagai aset dan liabilitas yang terkait di dalamnya. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid, memberikan informasi secara tepat waktu, secara akurat mengukur nilai keuangan berbagai transaksi, secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya.
4. Pengawasan (*monitoring*) adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal serta operasinya berjalan. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa prosedur terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan.
5. Aktivitas Pengendalian (*control activities*) adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda: pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Pengendalian komputer adalah hal yang penting. Pengendalian ini, yang secara khusus berhubungan dengan lingkungan TI dan audit TI sedangkan Pengendalian Fisik berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan dalam sistem akuntansi. Pengendalian fisik berkaitan dengan enam kategori aktivitas, yaitu otorisasi transaksi (*transaction authorization*, pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dapat berupa berbagai bentuk, tergantung pada berbagai kewajiban tertentu yang akan dikendalikan, supervisi, catatan akuntansi (*accounting records*) perusahaan terdiri atas dokumen sumber, jurnal dan buku besar, pengendalian akses (*access control*) adalah untuk memastikan bahwa hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke aset perusahaan. Verifikasi Independen (*verification procedure*) adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesalahan penyajian. Verifikasi berbeda dari supervisi karena terjadi setelah fakta, oleh seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi.

### Piutang

Giri (2012) menyatakan piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa (*asset*) tertentu untuk masa

yang akan datang. Piutang dapat timbul karena menjual barang/jasa atau karena perusahaan member pinjaman ke perusahaan lain. Umumnya piutang dicatat pada saat timbulnya yaitu setelah perusahaan menyerahkan barang/jasa yang dijual.

Menurut Baridwan (2004) piutang memiliki resiko tidak tertagih sehingga timbul kerugian. Terdapat dua metode dalam akuntansi kerugian piutang, yaitu:

1. Metode Hapus Langsung. Dalam metode ini perusahaan tidak membentuk cadangan. Jika ada piutang yang dihapus, Kerugian Piutang didebet, dan rekening Piutang dikredit. Saldo rekening Kerugian Piutang pada akhir tahun disajikan dalam Laporan Laba Rugi.
2. Metode Cadangan/Penyisihan. Dalam metode ini yang perusahaan membentuk cadangan atau penyisihan kerugian piutang dengan mendebet Beban Kerugian Piutang dan mengkredit Cadangan/Penyisihan Kerugian Piutang. Pada akhir tahun, saldo rekening Beban Kerugian Piutang disajikan dalam Laporan Laba Rugi, sedangkan saldo rekening Penyisihan disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebagai pengurang Piutang.

Dalam akuntansi piutang, secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur.

Pernyataan piutang ini merupakan unsur pengendalian intern yang baik dalam pencatatan piutang, dengan mengirimkan secara periodik pernyataan piutang kepada setiap debitur, catatan piutang perusahaan diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima dari debitur dari pengiriman pernyataan tersebut dan dapat menimbulkan citra yang baik dimata para debitur mengenai keandalan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih dan tidaknya piutang, secara periodik fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Daftar umur piutang ini merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu piutang.

#### 1. Dokumen

Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah Faktur Penjualan, Bukti Kas Masuk, Memo Kredit, Bukti Memorial (*Journal Voucher*).

2. Catatan Akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah Jurnal Penjualan, Jurnal Retur Penjualan, Jurnal Penerimaan Kas, Kartu Piutang.

3. Organisasi. Tugas fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang adalah menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur, menghasilkan pernyataan piutang

(*account receivable statement*) secara periodik dengan mengirimkannya ke setiap debitur, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur.

### Manajemen Kinerja

Menurut Merkusiwati (2003), penilaian kinerja perusahaan bagimanajemen dapatdiartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Sedangkan menurut Wibowo, (2012) Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

### Penelitian Terdahulu

Hartati (2009) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT SFI Medan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan:

1. Lingkungan pengendalian terhadap piutang usaha berjalan efektif dengan menerapkan SOP (*Standard Operating Procedures*);
2. Aktivitas pengendalian intern kurang efektif karena pengiriman barang dilakukan tanpa adanya otorisasi berupa

tanda tangan pada surat order pengiriman;

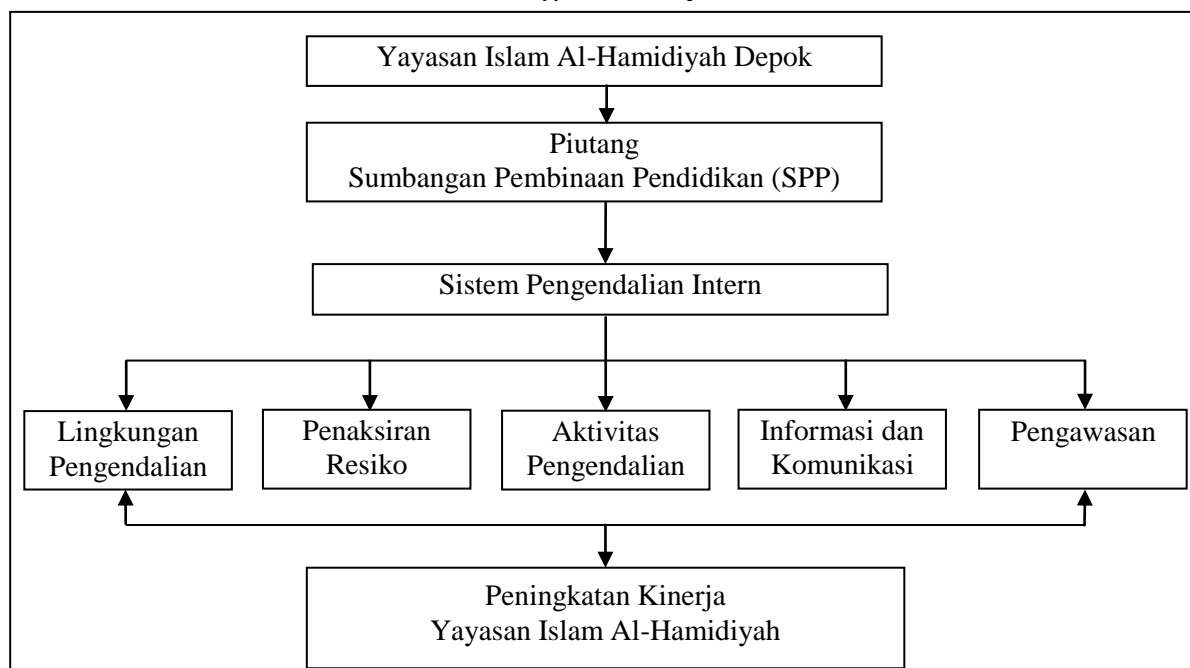
3. Pemegang kartu piutang merangkap sebagai penerimaan kas pada sore harinya;
4. Informasi dan komunikasi mengenai piutang usaha telah diterapkan cukup efektif, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen.

Wicaksana (2011), Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Efektivitas Arus Kas (Studi Kasus pada PT. Z). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terhadap sistem manajemen piutang yang dilakukan, PT. Z telah melakukan proses manajemen, pengelolaan, dan pengendalian piutang berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang telah ditetapkan oleh perusahaan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan SOP.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagaimana disajikan dalam gambar 1 berikut ini.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



(*observation*), dokumentasi (*documentation*) dan daftar pertanyaan (*questioner*).

### Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pengendalian intern atas piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Yayasan Islam Al-Hamidiyah Depok, lokasi penelitian adalah Jalan Raya Depok-Sawangan Km. 2 No. 12 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, 16435. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel piutang SPP sebagai variabel bebas dan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel terikat. Sedangkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan riset lapangan (*field research*) berupa wawancara (*interview*), pengamatan

Adapun analisis permasalahan yang timbul di dalam perusahaan dilakukan dengan cara menggunakan alat/metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis melakukan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan peninjauan langsung ke organisasi yang dijadikan penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap lima komponen pengendalian yang ada dalam organisasi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian atas resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan dan aktivitas pengendalian. Peneliti juga melakukan pengamatan mengenai prinsip-prinsip manajemen



kinerja yang ada dalam organisasi tersebut melalui dasar, kriteria serta karakteristik ukuran kinerja. Dalam hal ini penulis juga menganalisa penerapan sistem pengendalian intern atas piutang SPP dan unsur-unsur pengurang kinerja lainnya yang terjadi di perusahaan yang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern atas piutang SPP yang sesuai dapat diberlakukan kepada para guru dan karyawan pada Yayasan Islam Al-

ekonomi wali murid yang membuat timbulnya Piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Timbulnya piutang ini mau tidak mau dapat mempengaruhi kinerja keuangan organisasi apabila tidak dikelola dengan benar.

Berikut ini disajikan data-data piutang SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah mulai dari tingkat TPQ sampai dengan Madrasah Aliyah periode bulan Juli 2012 – Februari 2013 yang dapat dilihat pada tabel I berikut ini.

**Tabel 1**  
**Data Tunggakan SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah Depok**

No.	Tingkat	Tunggakan	Jumlah Seharusnya	%
1	TPQ	1.782.500	147.425.000	1,21
2	PG – TK	19.421.500	1.170.741.664	1,66
3	SMP ISLAM	61.187.500	1.767.037.500	3,46
4	MTS	161.745.000	4.375.200.000	3,70
5	MA	122.580.000	2.602.800.000	4,71
	<b>Total</b>	<b>366.716.500</b>	<b>10.063.204.164</b>	<b>14,74</b>

Sumber: Data Keuangan Yayasan Islam Al-Hamidiyah

Hamidiyah dan dapat dijadikan sebagai alat dalam peningkatan kinerja yaitu menganalisis kesesuaian sistem pengendalian intern atas piutang SPP yang dilaksanakan dengan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan.

### **Pembahasan**

Pelaksanaan SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah tidak selalu berjalan dengan lancar. Pembayaran SPP di Yayasan Islam Al-Hamidiyah tersebut masih ada yang ditunggak atau terlambat karena beberapa hal, misalnya kesulitan

Berdasarkan data diatas masih terdapat adanya tunggakan yang walaupun memiliki persentase kecil terhadap nilai keseluruhan penerimaan SPP, tetapi memiliki nilai yang cukup besar bagi kelancaran jalannya kegiatan kerja Yayasan.

Piutang SPP tersebut rata-rata memiliki umur piutang (*aging schedule*) yang berkisar antara 1 sampai 3 bulan. Dengan umur piutang yang cukup singkat diharapkan kegiatan operasional Yayasan dapat berjalan dengan lancar dan dapat

segera menjadi *cash in flow* pada saatnya jatuh tempo piutang tersebut. Adapun tabel *Aging Schedule* berdasarkan tunggakan piutang SPP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

operasional organisasi karena umur piutang SPP yang cukup pendek yaitu antara 1 sampai 3 bulan. Karena aliran penerimaan SPP yang masih belum dibayar persentasenya masih jauh lebih kecil dari

**Tabel 2**  
***Aging Schedule* Yayasan Islam Al-Hamidiyah periode Desember 2012 – Februari 2013**

No.	Tingkat	Total Des '12– Feb'13			Jumlah
		Des'12 1-30 hari	Jan'13 31-60 hari	Feb'13 61-90 hari	
1	TPQ	982.500	100.000	700.000	1.782.500
2	PG-TK	5.912.500	2.750.000	10.750.000	19.421.500
3	SMP Islam	24.837.500	11.550.000	24.800.000	61.187.500
4	MTs	25.480.000	35.635.000	100.630.000	161.745.000
5	MA	20.790.000	24.770.000	77.020.000	122.580.000
	<b>Total</b>	<b>78.002.500</b>	<b>74.805.000</b>	<b>213.900.000</b>	<b>366.707.500</b>
	<b>Persentase</b>	<b>21,27%</b>	<b>20,40%</b>	<b>58,33%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Keuangan Yayasan Islam Al-Hamidiyah

Dari tabel *Aging Schedule* di atas dapat dilihat bahwa persentase umur piutang pada bulan Desember 2012 sebesar 21,27% dari total tunggakan piutang SPP, pada bulan Januari 2013 sebesar 20,40% dari total tunggakan piutang SPP, sedangkan persentase umur piutang SPP pada bulan Februari 2013 atau bulan terakhir batas penagihan terjadi kenaikan sebesar 58,33% dari total tunggakan piutang SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah Depok.

Dalam proses pelaksanaan pembayaran SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah memang masih terdapat tunggakan yang cukup besar dari sisi nilai uang yang belum dibayarkan, tetapi secara keseluruhan belum mengganggu kegiatan

total penerimaan SPP yang seharusnya didapat dari tiap tingkatan dari mulai TPQ hingga Madrasah Aliyah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel piutang SPP yang telah diuraikan diatas.

Selain dari SPP, Yayasan Islam Al-Hamidiyah juga memperoleh pendapatan dari sumber pemasukan-pemasukan lainnya seperti Formulir Pendaftaran, Iuran Katering, Iuran Antar Jemput, Iuran Dana Pengembangan Pembangunan, Dana Kegiatan Siswa (DKS), Dana Pembelian Formulir Pendaftaran, Dana Seragam, Iuran Persatuan Orangtua Siswa dan Guru (POSG), Dana Buku dan lain-lain.

Penerimaan dana SPP tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi juga

menimbulkan piutang kepada siswa atau disebut piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas (*cash in flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Piutang usaha pada umumnya merupakan bagian dari total aktiva Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Oleh karena itu, pengendalian intern terhadap piutang usaha ini sangat penting diterapkan. Kecurangan dalam suatu siklus kerja sangat sering terjadi sehingga dapat merugikan Yayasan.

Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari siswa dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya. Pengendalian intern merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan. Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mengurangi resiko kerugian asset, memberikan informasi yang akurat, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Permasalahan pengontrolan piutang setiap bulan memerlukan pengendalian internal agar piutang SPP agar tidak terlalu besar

sehingga operasional sekolah dapat berjalan. Pengeluaran biaya di Yayasan Islam Al-Hamidiyah di bagi menjadi empat yaitu:

1. Biaya Sumber Daya Manusia meliputi biaya gaji guru dan pegawai sekolah, biaya pengembangan guru dan karyawan.
2. Biaya Operasional Sekolah meliputi biaya listrik, biaya AC, biaya alat tulis kelas (ATK), dan biaya lainnya sebagai penunjang pendidikan.
3. Biaya Kegiatan Anak yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan diri anak dan media pembelajaran sebagai penunjang pendidikan/ pengembangan diri anak.
4. Dana Invenstasi Pengembangan adalah biaya yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasana misalnya perbaikan gedung, menambah fasilitas sarana perpustakaan dan lain lain.

Dari unitpembayaran tersebut, yang paling rawan terjadi kecurangan adalah Kepala Asrama. SPP yang dilakukan oleh Kepala Asrama sangat mungkin dilakukan penyimpangan. Penyimpanan tersebut berupa *cash lapping*. Uang yang diterima dari orangtua siswa dikantongi dan baru diberikan ke bagian keuangan apabila telah terjadi pencocokan data dari pembayaran melalui Bank. Kecurangan yang mungkin

dilakukan adalah melalui pencatatan palsu pada lembar kuitansi, yakni data kuitansi yang diberikan kepada orangtua siswa.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa Yayasan Islam Al – Hamidiyah Depok telah memiliki prosedur Sistem Pengendalian Interen yang dituangkan dalam SOP (*Standard Operating Procedures*), namun demikian pelaksanaannya masih sangat sederhana, hal ini terlihat dalam proses pelaksanaan pembayaran SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah memang masih terdapat tunggakan yang cukup besar dari sisi nilai uang yang belum dibayarkan, meski secara keseluruhan belum mengganggu kegiatan operasional organisasi karena umur piutang SPP yang cukup pendek yaitu antara 1 sampai 3 bulan. Karena aliran penerimaan SPP yang masih belum dibayar persentasenya masih jauh lebih kecil dari total penerimaan SPP yang seharusnya didapat dari tiap tingkatan dari mulai TPQ hingga Madrasah Aliyah.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada Yayasan Islam Al – Hamidiyah Depok adalah sebaiknya Yayasan memiliki prosedur Sistem Pengendalian Interen yang tertuang dalam SOP (*Standard Operating Procedures*), agar masing – masing unit kerja memahami tugasnya dan dapat

menjalankannya dengan baik. Adapun Pengawasan sebaiknya lebih ditingkatkan, terutama dalam Aset – aset yang sifatnya likuid, misalnya Piutang. Piutang yang tidak tertagih dapat menyebabkan cash flow terhambat dan membuat Laporan Posisi Keuangan tidak menunjukkan angka – angka yang relevan. Pencatatan seluruh kegiatan keuangan terutama piutang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) seharusnya mulai dilakukan secara terkomputerisasi agar data yang tersimpan dapat diyakini kebenarannya dan diakui keakuratannya. Data keuangan yang dicatat secara manual mudah untuk dimanipulasi sehingga menimbulkan celah untuk melakukan penyalahgunaan dana oleh karyawan yang memiliki mental korup, adapun Kepala Asrama sebaiknya tidak menerima uang pembayaran dari siswa secara langsung, karena hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dalam bentuk korupsi yang dapat mengganggu kelancaran *cash flow* Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Dalam hal pengelolaan Piutang, *Aging schedule* sebaiknya digunakan juga untuk penagihan pembayaran yang sudah lebih dari 3 bulan, dan nomor formulir pembayaran SPP pada Yayasan Islam Al-Hamidiyah harus dicetak dan bukan dituliskan karena pencatatan dengan penulisan tangan dapat mencegah pemalsuan dan penyimpangan pembayaran SPP.

---

**Daftar Pustaka**

- Baridwan, Zaki, (2004) *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta.
- Giri Elfraim Ferdinan (2012), *Akuntansi Menengah Keuangan I*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Gondodiyoto, Sanyoto. (2009), *Committee Sponsoring Organization Tread way Commission*.
- Hall, James A yang diterjemahkan oleh Fitriasari, Dewi. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-4. Jakarta : Salemba Empat.
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. (2007). "Evaluasi Pengaruh CAMEL terhadap Kinerja Perusahaan". *Buletin Studi Ekonomi*. 12(1): h: 102—110.
- Warren, Reeve and Fess yang diterjemahkan oleh Farahmita, Aria. (2008). *Pengantar Akuntansi*. Edisi ke-21. Jakarta : Salemba Empat.
- Wibowo, (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.